

UPAYA INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM PENEGAKAN PASAL 27 KONVENSI JENEWA IV BAGI PEREMPUAN DI KONFLIK YAMAN

Agustianty Debora Sihite¹
Nim. 1102045005

Abstract

When conflicts happen women often get physical and mental injuries such as sexual violence, rape and physical abuse. It also happened to women in Yemen when the conflict occurred. Conflict that lasted from 2015 until now has caused many casualties, especially to women. Women, pregnant woman and lactating women are difficult to survive and suffice their needs. International Humanitarian Law set out clearly in The Convention of Geneva IV 1949 on the protection of civil society. Women receive distinction and preferential treatment in the case of protection when conflicts occur. The ICRC as a humanitarian and bodyguard organization of the Geneva Conventions seeks to reduce the number of women as victims of sexual violence. The ICRC works with local and international organizations. The efforts made by the ICRC are providing medical assistance and providing safe home services.

Keywords: *Conflict of Yemen, women, article 27, The Convention of Geneva, ICRC.*

Pendahuluan

Dalam situasi konflik, perempuan seharusnya diperlakukan sebagai objek yang harus dilindungi. Namun pada kenyataannya, ketika konflik terjadi perempuan sering kali menjadi pihak yang paling tersakiti. Dimana mereka sering kali mendapatkan tindakan kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan ketika konflik terjadi perempuan tidak turut serta dalam proses perdamaian.

Dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* mendefinisikan diskriminasi perempuan sebagai perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin yang memiliki tujuan untuk merusak dan meniadakan pengakuan dan kesenangan oleh perempuan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil dan bidang lainnya. Akan tetapi dalam *CEDAW* tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana perempuan sebagai korban seharusnya diperlakukan di dalam situasi konflik.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: agustiantydebora@gmail.com

Pada tahun 1949, perwakilan diplomatik menyetujui dan menandatangani perubahan pada Konvensi I, II dan III serta terbentuknya Konvensi Jenewa IV. Konvensi Jenewa IV bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap warga sipil pada saat konflik. Pada pasal 27 paragraf kedua menyebutkan “*Women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault*” yang artinya wanita harus terutama dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan.

Konflik Yaman yang terjadi pada tahun 2015 hingga saat ini, bermula ketika kelompok Houthi dan pasukan pendukung mantan Presiden Yaman, Ali Abdullah Saleh berhasil menduduki ibukota Yaman, Sana’a dan memaksa Presiden Abdul Rabbuh Mansur Hadi melarikan diri ke Arab Saudi. Konflik ini dipicu setelah kelompok Houthi yang mayoritas berasal dari kelompok Syi’ah berhasil melengserkan presiden Saleh dari masa kepemimpinannya. Pada masa transisi kepemimpinan Presiden Hadi, masyarakat Yaman melakukan protes karena tidak tersedianya kebutuhan dasar hidup dan melonjaknya harga minyak bumi. Kelompok Houthi mendapat peluang untuk memaksa Presiden Hadi mundur ketika protes terus berlangsung dan berhasil menguasai Sana’a pada bulan September. Konflik ini masih berlangsung karena adanya intervensi dari kelompok internal dan negara-negara lain.

Dampak yang dihadapi oleh perempuan adalah sebuah ketakutan dan kecemasan terkait keamanan, mata pencaharian dan keamanan anak-anak. Perempuan banyak mengalami kekerasan seksual, pemerkosaan dan tekanan psikologis akibat konflik. Banyaknya jumlah kekerasan yang terjadi dan upaya yang belum maksimal, menyebabkan *Yemen Red Crescent Society* meminta bantuan kepada *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* untuk menangani masalah kemanusiaan di Yaman. ICRC mulai terlibat dalam konflik sejak konflik terjadi pada tahun 2015 hingga saat ini. Keterlibatan ICRC dalam konflik ini karena ICRC merupakan organisasi kemanusiaan dan pengawal dari Konvensi Jenewa.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep *Hukum Humaniter Internasional (HHI)*

Dalam arti luas Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis dan tidak tertulis yang mencakup Hukum Perang dan Hak Asasi Manusia bertujuan menjamin penghormatan terhadap harkat dan pribadi seseorang. Hukum Humaniter Internasional adalah salah satu cara yang dapat digunakan oleh setiap negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi diberbagai negara.

Hukum Humaniter Internasional berlaku pada saat terjadinya perang atau konflik bersenjata (*international humanitarian law applicable in armed conflict*). Dengan kata lain, hukum humaniter tidak berlaku pada masa damai dan juga tidak berlaku pada saat situasi seperti kerusuhan, huru-hara dan ketegangan. Sumber-sumber hukum mengatur HHI diantaranya adalah perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa. Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam HHI adalah kemanusiaan, kepentingan

(*necessity*), proporsional (*proportionality*), pembedaan (*distinction*), prinsip larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya (*prohibition of causing unnecessary suffering*), pemisahan antara *ius ad bellum* dengan *ius in bello*, ketentuan minimal HHI dan tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan HHI.

Dalam konflik bersenjata yang bersifat internasional berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, sedangkan dalam konflik bersenjata non-internasional hanya berlaku Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977. Konvensi Jenewa I berisi tentang perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata yang menjadi korban luka dan sakit di medan pertempuran darat, Konvensi Jenewa II berisi tentang perbaikan angkatan bersenjata yang menjadi korban luka, sakit atau karam di medan pertempuran laut. Konvensi Jenewa III berisi tentang perlakuan terhadap tawanan konflik dan Konvensi Jenewa IV berisi tentang perlindungan bagi warga sipil. Protokol I berisi tentang perlindungan korban konflik pada situasi sengketa bersenjata internasional, Protokol II berisi tentang perlindungan korban konflik pada situasi sengketa non-internasional dan Protokol III berisi tentang aturan tambahan mengenai lambang.

Woman in Conflict

Konflik dapat berarti sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*percieved divergen of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Dalam Hukum Humaniter konflik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Konflik bersenjata yang bersifat internasional disebut juga sebagai konflik bersenjata antar dua negara atau lebih.
2. Konflik bersenjata yang bersifat non-internasional disebut sebagai “perang pemberontakan” yang terjadi di dalam suatu negara antara pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah atau antara kelompok-kelompok non-pemerintah dalam suatu negara.

Menurut J.G. Starke, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi 3 bentuk, yaitu :

1. Penyelesaian secara damai yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan solusi bersahabat.
 - a. Negosiasi, adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui perundingan tanpa pihak ketiga.
 - b. Jasa Baik (*Good Offices*), apabila negosiasi tidak berjalan dengan baik, maka dibutuhkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Dalam Jasa Baik ini pihak ketiga berusaha mengupayakan pertemuan para pihak-pihak bersengketa untuk berunding tanpa adanya keterlibatan dalam perundingan tersebut.
 - c. Mediasi, bertujuan menciptakan hubungan langsung antara pihak yang bersengketa. Mediator berperan aktif dalam mendamaikan pihak yang bersengketa dan dapat memberikan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa.
 - d. Pencarian Fakta (*Fact Finding/ Inquiry*), yang berfungsi untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak,

- melalui investigasi secara terus menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak lain.
- e. Konsiliasi (*Conciliation*), metode penyelesaian sengketa secara politik yang menggabungkan cara-cara *inquiry* dengan mediasi.
2. Penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau yang diterapkan adalah melalui kekerasan.
 - a. Perang, bertujuan untuk menaklukkan negara lawan dimana negara yang dikalahkan tersebut akan menerima syarat penyelesaian-penyelesaian dan tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi hal tersebut.
 - b. Retorsi, istilah pembalasan dendam oleh suatu negara atas tindakan kurang bersahabat dari negara lain.
 - c. Reprisal, metode yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengupayakan ganti rugi dari negara lain dengan melakukan tindakan yang sifatnya pembalasan.
 - d. Blokade secara damai, blokade yang dilakukan pada waktu damai untuk memaksa negara yang di blokade tersebut agar memenuhi ganti rugi yang diderita negara yang memblokade.
 - e. Embargo, larangan ekspor barang ke negara yang dikenai embargo.
 - f. Intervensi, suatu tindakan yang melebihi campur tangan, yang lebih kuat daripada mediasi atau usulan diplomatik.
 3. Penyelesaian secara hukum
 - a. Melalui jalur arbitrase, prosedur penyelesaian sengketa antar negara yang bersifat mengikat berdasar hukum dan hasilnya dapat diterima secara sukarela.
 - b. Melalui pengadilan Internasional

Dalam situasi konflik istilah “perempuan” sering dikaitkan dengan kerapuhan, ketidakstabilan dan ketidakmampuan untuk bertahan hidup. Perempuan digambarkan sebagai korban konflik yang merupakan target pemerkosaan, menjadi janda dan pihak yang paling menderita di sektor sosial. Selain menjadi korban, dalam konflik perempuan juga bertindak sebagai seorang kombatan, pihak yang aktif dalam perang dan mendukung pemberontakan serta bertindak sebagai “*peace maker*” atau “*peace decision*”.

Perlindungan bagi perempuan dalam perang tercantum dalam HHI yang mengikat antara kedua negara dan kelompok-kelompok oposisi bersenjata. Perempuan memiliki keuntungan dari perlindungan hukum yang diberikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yaitu mereka harus bebas dari intimidasi dan kekerasan dan juga mendapatkan perlindungan khusus dalam hal kesehatan dan kebersihan sebagai seorang ibu. Masalah-masalah yang sering terjadi pada perempuan dalam konflik diantaranya adalah pemindahan, kehilangan anggota keluarga, kesehatan, pelecehan seksual, ranjau dan sisa bahan peledak dalam perang, keikutsertaan dalam perang, penahanan dan perempuan dalam perang. Permasalahan yang sering dihadapi perempuan saat konflik terjadi bukan karena tidak ada hukum yang melindungi mereka tetapi karena hukum tidak cukup dihormati, dilaksanakan atau ditegakkan.

Metodologi Penelitian

Dalam metode penelitian penulis menggunakan tipe penelitian *deskriptif* dimana penulis akan memberikan gambaran yang jelas dan konkrit mengenai Upaya *International Committee of The Red Cross (ICRC)* dalam menegakkan pasal 27 Konvensi Jenewa IV bagi perlindungan perempuan di konflik Yaman. Data yang disajikan adalah data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi ICRC, buku, jurnal, internet, serta sumber-sumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Konflik Yaman

Yaman merupakan sebuah negara di kawasan Timur Tengah yang terbagi atas 2 wilayah yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yaman Utara dikuasai oleh kelompok Houthi berpusat di kota Sana'a dan Yaman Selatan dikuasai oleh pemerintah Republik Yaman berpusat di kota Aden. Pada tahun 1990 kedua bagian negara tersebut telah menjadi satu dibawah kekuasaan Presiden Ali Abdullah Saleh akan tetapi masyarakat Yaman Utara merasa terdiskriminasi oleh pemerintah Yaman yang mayoritas dikuasai oleh Yaman Selatan.

Konflik yang terjadi di Yaman bermula pada tahun 2011 kelompok Houthi terlibat dalam tindakan "Revolusi Yaman" yang merupakan sebuah efek dari "*Arab Spring*" yang sedang melanda di daerah Timur Tengah. Konflik yang menyebabkan mundurnya Presiden Ali Abdullah Saleh dari masa kepemimpinan selama 32 tahun, yang kemudian digantikan oleh Abdrabbuh Mansour Hadi. Kelompok Houthi adalah kelompok yang berasal dari Yaman Utara dan mayoritas beraliran Syi'ah.

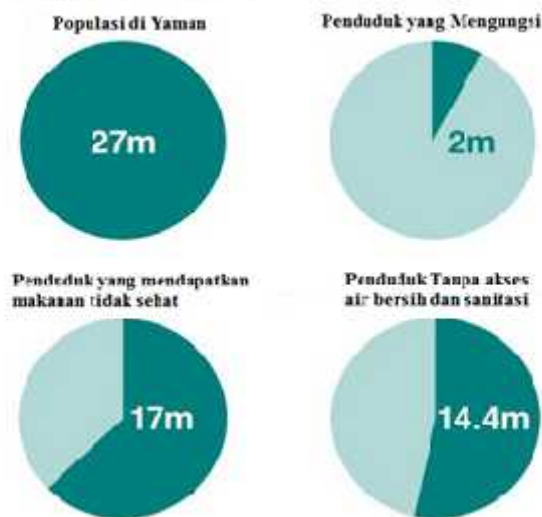
Kelompok Houthi akhirnya berhasil mengambil alih istana kepresidenan tiga hari setelah pengunduran diri Presiden Hadi pada 21 Januari 2015. Pada 6 Februari 2015 pemimpin kelompok Houthi mengumumkan pembentukan Komite Revolusioner dan mengambil alih pemerintahan Yaman. Pada 16 Februari 2015 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang menuntut agar kelompok Houthi segera menyerahkan kontrol atas pemerintah Yaman. Dengan segera dan tanpa syarat menarik pasukan dari institusi pemerintah serta menuntut Houthi untuk membebaskan Presiden Abd Hadi dan kabinetnya dari rumah tahanan. Namun menurut juru bicara Houthi Mohammed Abdulsalam, Houthi tidak akan menarik dan menyerahkan kekuasaannya.

Setelah berhasil kabur dan melarikan diri ke Aden pada 21 Februari 2015, Presiden Hadi menarik kembali keputusan pengunduran diri yang sudah dikeluarkan oleh parlemen sebelumnya dengan alasan keputusan tersebut tidak konstitusional dan tidak sah. Kemudian pada 16 Maret 2015 Perdana Menteri dan seluruh kabinet dibebaskan setelah menjadi tahanan rumah selama 2 bulan. Selain di bagian utara Yaman, konflik juga terjadi di selatan negara tersebut antara pasukan pro-Saleh dan pasukan pemerintah. Ketika konflik terjadi banyak aktor-aktor luar yang turut terlibat, diantaranya adalah Arab Saudi. Arab Saudi memulai intervensi bersama delapan negara Arab lainnya yang termasuk dalam *Gulf Cooperation Council* dan dengan bantuan Amerika Serikat untuk melawan kelompok Houthi. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik ini memiliki tujuan untuk melawan jaringan *Al Qaeda (AQAP)*.

Menurut *United Nations Office for The Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA), diperkirakan 18,8 juta orang atau 69% penduduk Yaman menerima dampak dan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sekitar 3,3 juta orang telah mengungsi dan lebih dari 2 juta orang telah kehilangan tempat tinggal. Yaman juga mengalami krisis kebutuhan pangan, sekitar 17 juta orang mendapatkan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini menyebabkan sekitar 3,3 juta anak-anak dan ibu hamil atau menyusui kekurangan gizi termasuk 462.000 anak balita yang mengalami malnutrisi.

Gambar 3.4 Skala Krisis Kemanusiaan di Yaman

Skala Krisis Kemanusiaan di Yaman



Sumber : *United Nations Office for The Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA)

Selain krisis kemanusiaan, dampak lain dari konflik ini adalah kerusakan fasilitas umum di Yaman. Data yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) pada Januari 2017 menyebutkan bahwa sekitar 274 fasilitas kesehatan telah rusak atau dihancurkan. Data yang diambil dari laporan Kementerian Pendidikan Yaman pada tahun 2016 menunjukkan sekitar 1.671 sekolah di 20 provinsi mengalami kerusakan, 287 sekolah memerlukan perbaikan ulang, 544 sekolah difungsikan sebagai tempat penampungan bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal dan 33 sekolah dikuasai oleh kelompok bersenjata

United Nations (U.N) mengadakan perundingan dengan pemerintah Yaman yang didukung oleh Amerika Serikat, Arab Saudi dan juga kelompok Houthi pada April 2016 di Kuwait. Perundingan tersebut meminta Houthi untuk menarik diri dari daerah yang sudah mereka kuasai sejak tahun 2014 dan menyerahkan senjata kepada pemerintah Yaman. Akan tetapi Houthi menolak usulan tersebut dan tetap melakukan penyerangan. *United Nations* kemudian mengusulkan untuk melakukan gencatan senjata akan tetapi Arab Saudi dan Houthi serta sekutunya melakukan pelanggaran

gejanta senjata. Hal ini mengakibatkan, U.N memperpanjang waktu gejjatan senjata menjadi 72 jam pada bulan Oktober 2016. Selama masa gejjatan senjata, UN hanya megizinkan adanya pengiriman bantuan kemanusiaan seperti, obat-obatan dan bahan makanan.

International Committee of The Red Cross (ICRC)

International Committee of The Red Cross (ICRC) merupakan organisasi yang tidak memihak, netral dan mandiri yang memiliki misi bersifat kemanusiaan yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lain dan memberi bantuan. ICRC mengarahkan dan mengkoordinasi kegiatan kemanusiaan dan berupaya mempromosikan dan memperkuat hukum humaniter dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Tugas ICRC antara lain adalah memantau kepatuhan para pihak yang bertikai kepada Konvensi Jenewa, mengorganisir perawatan terhadap korban luka di medan perang, mengawasi perlakuan terhadap tawanan perang dan melakukan intervensi yang bersifat konfidensial dengan pihak berwenang yang melakukan penahanan, membantu pencarian orang hilang dalam konflik bersenjata, mengorganisir perlindungan dan perawatan penduduk sipil dan bertindak sebagai perantara netral antara para pihak yang berperang. ICRC juga mempunyai tugas-tugas yang tidak secara khusus diamanatkan oleh hukum seperti mengunjungi tahanan politik di luar konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam bencana alam.

Kegiatan ICRC diatur oleh tujuh prinsip dasar yang ditaati bersama oleh ICRC dan semua komponen gerakan lainnya, prinsip-prinsip tersebut adalah kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan. Prinsip-prinsip ini menyatukan ICRC, Perhimpunan Nasional dan Federasi Internasional dan merupakan kunci yang membedakan identitas mereka. Kegiatan ICRC terbagi dalam empat kategori yaitu perlindungan (*protection*), bantuan (*assistance*), pencegahan (*prevention*) dan kerjasama (*cooperation*). Mandat hukum ICRC bersumber pada Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan dan Satuta Gerakan. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan merupakan inti dari hukum humaniter internasional yang mengatur pelaksanaan konflik bersenjata dan berusaha mengurangi dampak dari konflik. Sehingga dapat dikatakan bahwa ICRC adalah aktor yang bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang tertera dalam Konvensi Jenewa.

International Committee of The Red Cross berada di Yaman sejak perang saudara pada tahun 1962. Akan tetapi sejak terjadinya konflik antara kelompok Houthi dan pemerintah Yaman pada tahun 2004 yang pada saat itu masih dipimpin oleh Presiden Saleh, ICRC bekerja sama dengan *Yemeni Red Crescent Society (YRCS)* untuk mengurangi dampak yang disebabkan oleh konflik. *ICRC* dan *YRCS* pertama kali berkerja sama pada bulan Juni 2005 untuk menyediakan air bersih di Saada. Ketika konflik berlangsung, ICRC membantu memastikan adanya perawatan kesehatan terhadap masyarakat sipil di tengah kurangnya pasokan kesehatan pada waktu perang. Selain perawatan kesehatan, ICRC juga berusaha melakukan komunikasi bilateral dengan pihak-pihak yang terkait dalam konflik, mengunjungi tahanan dan berusaha mengumpulkan informasi tentang anggota keluarga yang terpisah.

Korban Perempuan dalam Konflik Yaman

Jauh sebelum konflik terjadi status dan keberadaan perempuan berada di posisi rendah. Hal ini dapat terlihat hampir di semua sektor kehidupan terutama di bidang ekonomi, sosial dan politik. Maka dari itu, jauh sebelum konflik terjadi perempuan di Yaman sudah mengalami tindakan kekerasan termasuk penganiayaan fisik dan psikologis, pelecehan seksual, pemerkosaan dan perampasan layanan kesehatan.

Pada tahun 2012 hingga 2014 perempuan memiliki kesempatan untuk aktif dalam forum diskusi dan menghasilkan 30% suara peserta untuk menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemerintahan. Mereka ingin mengubah dan menyusun kembali undang-undang untuk melindungi perempuan terhadap kekerasan yang sering dialami. Sebelum undang-undang tersebut terlaksana, perang sipil terjadi di Yaman. Meskipun pada tahun 2012 hingga 2014 perempuan aktif untuk menuntut hak mereka, angka kekerasan yang diterima perempuan tidak menunjukkan hal yang baik. Jumlah tersebut dapat kita lihat dalam tabel yang tersedia dibawah.

Tabel 3.1. Kekerasan Terhadap Perempuan di Yaman

Bulan	Kematian		Pemukosaan		Kekerasan Seksual		Kekerasan Fisik	
	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2013	Tahun 2014
Januari	122	244	4	7	1	2	20	40
Februari	196	391	7	14	7	13	42	83
Maret	82	163	3	5	3	6	17	33
April	48	95	6	11	9	18	16	31
Mei	168	226	11	22	67	134	67	134
Juni	161	322	6	12	83	166	77	154
July	322	644	9	18	13	25	155	310
Agustus	139	278	7	14	2	3	80	160
September	174	348	5	9	2	3	72	144
Oktober	184	368	4	7	5	9	90	179
November	-	478	-	10	-	10	-	228
Jumlah	1596	3557	62	129	192	389	636	1496

Sumber : *Yemen Gender Based Violence Dashboard*

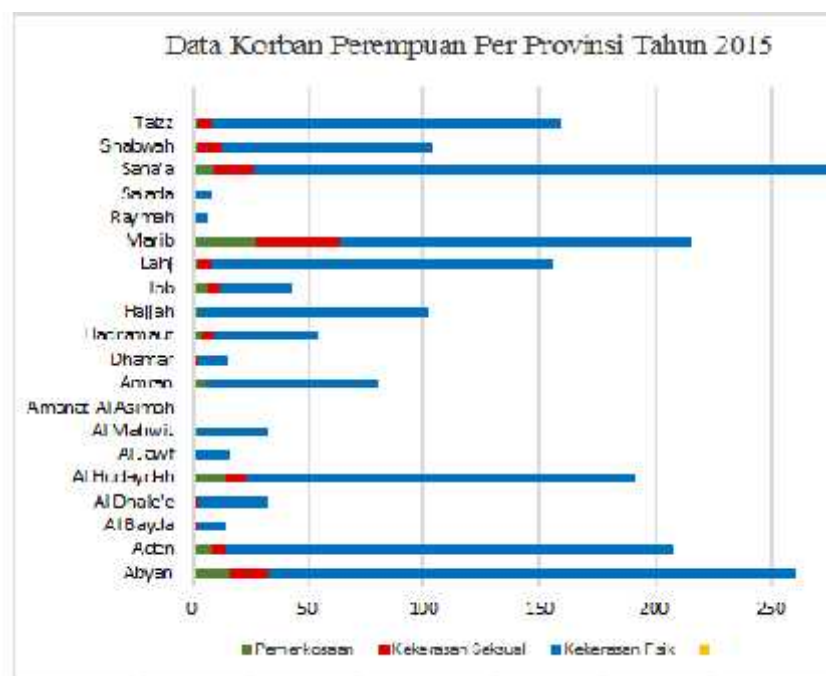
Pada tahun 2015 ketika konflik terjadi, kondisi perempuan di Yaman kembali mengalami kesulitan. Perempuan kesulitan untuk berjuang seorang diri karena kehilangan suami yang pergi berperang dan mereka harus mencukupi kebutuhan keluarga seorang diri. Dan yang paling merasa menderita adalah ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui. Dalam konflik, perempuan dapat bertahan hidup bergantung pada bantuan dan layanan kesehatan yang mereka dapatkan. Menurut data *The United Nations Population Fund (UNFPA)*, 90% kekerasan yang mereka rasakan terjadi

dirumah, ketika terjadi konflik keadaan perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual.

Hasil temuan dari laporan Safeworld yang bekerjasama dengan *Center for Applied Research in Partnership with the Orient (CARPO)* and *the Yemen Polling Center (YPC)* menyimpulkan bahwa perang yang terjadi telah menimbulkan tiga kecemasan utama yang dihadapi perempuan Yaman saat konflik melanda negara mereka, yaitu keamanan, mata pencaharian, dan bagaimana melindungi anak-anak mereka. Tidak adanya kepastian hukum dan kondisi hukum Yaman yang diskriminatif terhadap perempuan menimbulkan ketakutan akan tindakan pencurian, pembunuhan, dan pelecehan seksual. Selain itu, peredaran senjata diantara para pihak yang berkonflik sangat mengkhawatirkan para perempuan di Yaman, terutama terkait dengan kejadian tembakan yang salah sasaran dan bom yang akan melukai keluarga dan anak-anak mereka.

Data dari tabel 3.2. menjabarkan bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan di Yaman sangat didominasi oleh kekerasan fisik yang mencapai angka 1752 orang pada tahun 2015 dan meningkat cukup drastis pada tahun 2016 yang mencapai angka 2921 orang. Jumlah kekerasan seksual yang mencapai angka 126 orang pada 2015 dan meningkat tinggi pada tahun 2016 yang menjadi 437 orang pada tahun 2017. Meskipun secara jumlah paling minim namun kasus pemerkosaan yang terjadi di Yaman merupakan hal memprihatinkan, yaitu terjadi 111 kasus pada 2015 dan 168 orang pada tahun 2016.

Tabel 3.2 Kekerasan Terhadap Perempuan di Konflik Yaman 2015-2016



Sumber : *Workbook Gender Based Violence INTERSOS dan Yemen Women Union*

Yemen Women Union (YWU) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual paling banyak terjadi di kota Marib. Sebanyak 28 kasus pemerkosaan dan 36 kasus kekerasan seksual terjadi di kota tersebut. Sedangkan kekerasan fisik dan pernikahan paksa paling banyak terjadi di kota Sana'a. Terdapat 256 kasus kekerasan fisik dan 220 kasus pernikahan paksa terjadi di kota tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari data grafik dibawah.

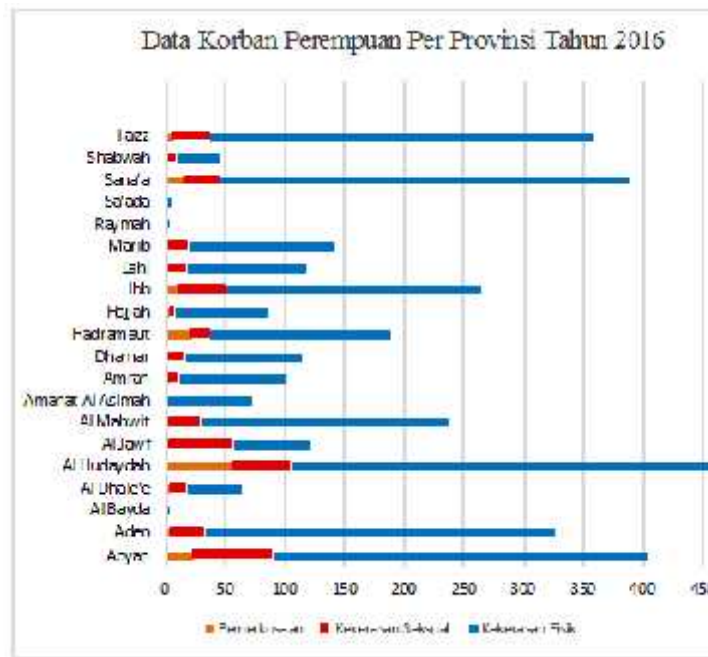
Grafik 3.1 Kekerasan yang Terjadi di Yaman tahun 2015

Bulan	Kematian		Pemeriksaan		Kekerasan Seksual		Kekerasan Fisik	
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2015	Tahun 2016
Januari	245	424	6	2	8	13	16	179
Februari	391	412	13	18	15	19	81	214
Maret	163	412	5	13	6	16	33	245
April	-	392	-	7	-	9	-	227
Mei	336	372	10	11	22	16	134	265
Juni	332	347	12	11	12	266	154	17
July	644	355	18	15	25	14	310	190
Agustus	278	363	14	21	3	4	160	199
September	348	223	9	16	3	6	144	145
Oktober	368	314	7	18	9	3	179	203
November	478	584	10	13	10	11	228	417
Desember	549	889	7	23	13	60	313	620
Jumlah	4132	5087	111	168	126	437	1752	2921

Sumber : Diolah dari *Yemen Gender Based Violence Dashboard*

Dari 144 negara yang diteliti oleh *World Economic Forum's Global Gender Gap Index* pada tahun 2016 Yaman menempati posisi terakhir dari negara di dunia yang memiliki ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender yang begitu parah di Yaman dan lamanya konflik menyebabkan perempuan rentan terhadap pemerkosaan, kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Dampak dari ketidaksetaraan gender di Yaman dapat terlihat dari banyaknya perempuan yang mengalami pemerkosaan dan kekerasan fisik terutama di kota Al Hudaydah. Sebanyak 56 kasus pemerkosaan dan 354 kasus kekerasan fisik terjadi di kota tersebut sedangkan 66 kasus kekerasan seksual banyak dialami oleh perempuan di kota Abyan. Di tahun 2016 kekerasan terhadap perempuan di Yaman meningkat secara signifikan. Data di grafik 3.2. menyebutkan bahwa perempuan di kota Al Hudaydah banyak mengalami kasus pemerkosaan, kekerasan seksual dan kekerasan fisik.

Grafik 3.2 Kekerasan yang Terjadi di Yaman tahun 2016



Sumber : Diolah dari *Yemen Gender Based Violence Dashboard*

Pada laporan terakhir di Bulan Agustus 2017, terdapat 2,2 juta perempuan Yaman yang berada pada usia produktif, yaitu perempuan Yaman yang berusia 15-49 tahun. Ada 1,1 juta wanita hamil yang mengalami kekurangan gizi dan 2,6 juta perempuan dan anak perempuan yang berisiko mengalami kekerasan berbasis gender. Dari jumlah 2,6 juta perempuan yang berisiko mengalami kekerasan berbasis gender, hanya 17.109 perempuan yang mendapat pelayanan kesehatan dan konseling dari korban yang menderita kekerasan perempuan berdasarkan gender yang dimana di dalamnya mencakup kasus pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Data yang disajikan oleh UNPFA merupakan akumulasi dari korban yang ditangani dari Januari hingga Agustus 2017.

Perlindungan Perempuan dalam Konflik Yaman

Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah hukum yang mengatur pelaksanaan perang dan merupakan cabang hukum internasional. HHI berusaha membatasi dampak konflik bersenjata dan melindungi orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik dan membatasi serta mengatur sarana dan metode konflik. Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk mencegah dan meringankan penderitaan manusia dalam perang tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Akan tetapi diketahui bahwa perempuan menghadapi masalah spesifik dalam konflik bersenjata seperti kekerasan seksual dan risiko terhadap kesehatan mereka. Selain itu perempuan juga rentan terhadap adanya pemisahan anggota keluarga dan penderitaan yang disebabkan oleh hal yang tidak diketahui sehingga anggota keluarga mereka hilang baik selama dan setelah konflik.

Konvensi Jenewa mulai diadaptasi setelah komite internasional mengubah tiga konvensi sebelumnya dan membuat satu konvensi baru pada tahun 1949. Pada saat Perang Dingin, hakikat konflik bersenjata mengalami perubahan dan banyak pihak

yang berpendapat bahwa Konvensi-konvensi Jenewa 1949 menyikapi keadaan yang sebagian besar sudah punah. Sebagian besar konflik bersenjata yang terjadi dalam era Perang Dingin adalah konflik bersenjata internal atau perang saudara dan menyebabkan semakin banyak korban di kalangan orang sipil. Karena adanya perubahan-perubahan tersebut maka pada tahun 1977 diadopsi dua protokol yang memperluas Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dengan sejumlah ketentuan yang memberikan perlindungan tambahan. Dan pada tahun 2005 sebuah Protokol ketiga diadopsi pula.

Keempat Konvensi Jenewa 1949 telah diratifikasi oleh 196 negara bagian termasuk semua negara anggota PBB dan negara Palestina. Protokol Tambahan telah diratifikasi oleh 174, 168 dan 73 negara bagian. Dalam konflik bersenjata yang bersifat internasional berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Sedangkan dalam konflik bersenjata yang bersifat non-internasional hanya berlaku dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977.

Dalam Konvensi Jenewa IV yang berisi tentang perlindungan terhadap warga sipil pada saat konflik terdapat 159 pasal yang mana wanita mendapatkan perbedaan dan perlakuan istimewa dalam hal perlindungan ketika konflik terjadi. Salah satu pasal diantaranya adalah pasal 27 paragraf kedua yang menyebutkan "*Women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault*" yang artinya wanita harus terutama dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan.

Selain dalam Konvensi Jenewa IV, peraturan perlindungan perempuan terhadap kekerasan seksual juga terdapat dalam Protokol Tambahan I pasal 76 paragraf pertama. Isi pasal tersebut menyebutkan bahwa "*Women shall be the object of special respect and shall be protected in particular against rape, forced prostitution and any other form of indecent assault*" yang artinya wanita harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terutama terhadap perkosaan, pelacuran paksaan dan setiap bentuk serangan tak senonoh lainnya. Selain perlindungan terhadap adanya kekerasan seksual, Konvensi Jenewa juga mengatur perlindungan terhadap wanita hamil dan wanita dalam tahanan.

Upaya-Upaya ICRC Bagi Perlindungan Perempuan di Konflik Yaman

1. Bantuan Medis

Sejak konflik terjadi di Yaman pada tahun 2015 yang menyebabkan kekurangan bantuan medis dan perlengkapan bedah. Untuk mengatasi hal tersebut ICRC berkoordinasi dengan YRCS (*Yemeni Red Crescent Society*) melakukan berbagai upaya diantaranya adalah mendukung 62 rumah sakit, 44 fasilitas kesehatan di 15 provinsi melalui 282 sumbangan medis dan perlengkapan bedah yang memungkinkan para tenaga medis untuk mengobati yang terluka di medan perang. Tercatat dalam laporan ICRC pada tahun 2015, bantuan medis tersebut berhasil mengobati lebih dari 26.000 korban terluka dan melakukan lebih dari 14.900 operasi.

ICRC juga mendukung 18 pusat utama kesehatan di kota Saada, Amran, Sana'a, Al-Baida, Abyan dan Al-Dhale yang bermanfaat bagi 300.000 orang dengan adanya ketersediaan obat-obatan yang lengkap. Serta mendukung dua rumah sakit di Aden khususnya di kota Al-Jamhouria dan Al-Mansoura dengan adanya staf medis yang bekerja secara intensif dan persediaan obat-obatan.

Lebih dari 30% obat-obatan yang dibutuhkan dan alat kesehatan sudah berada di Yaman pada pertengahan tahun 2016. Untuk mengatasi kekurangan persediaan medis, ICRC setiap bulannya memberikan bantuan medis dan bedah ke rumah sakit utama sehingga mereka setidaknya berhasil melakukan 3.449 operasi dan menyediakan ruang rawat inap. ICRC juga mendukung 52 rumah sakit dan 16 fasilitas kesehatan di 14 provinsi melalui 1000 bantuan kesehatan.

Selain memberikan bantuan medis dan mendukung beberapa rumah sakit di Yaman, ICRC juga menyelenggarakan kursus atau latihan Trauma Ruang Darurat di 3 rumah sakit di Sana'a, Hadramawt dan Amran untuk total 60 tenaga medis profesional. Serta melakukan 12 sesi pelatihan bantuan pertolongan pertama kepada 278 pada tahun 2015 dan memberikan 13 sesi pelatihan kepada 242 angkatan bersenjata dan tenaga medis pada tahun 2016. ICRC perlu melakukan upaya tersebut karena dengan menguasai kemampuan pertolongan pertama dapat mengurangi jumlah korban jiwa ketika konflik sejak berlangsung.

Data menurut ICRC pada tahun 2016 sebanyak 69.812 perempuan mendapatkan bantuan bahan makanan dan 31.521 perempuan mendapat bantuan barang rumah tangga demi memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Sebanyak 99.505 perempuan melakukan konsultasi kesehatan hingga akhir tahun 2016. Pihak rumah sakit menerima pasien sebanyak 92.211 dan 23.416 diantaranya adalah perempuan. ICRC membantu persalinan bagi ibu hamil dan menyusui, tercatat sebanyak 10.530 perempuan yang telah terdaftar dan 50.626 masih menjalani rawat jalan. ICRC tidak hanya mengobati perempuan yang terluka maupun yang sedang hamil, sebanyak 18.702 perempuan tercatat sebagai pasien yang menerima fisioterapi akibat dari kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.

Ketika konflik bersenjata yang bersifat internasional seperti yang terjadi di Yaman, berlaku ketentuan hukum dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Konvensi Jenewa mengatur tentang perlindungan bagi warga sipil dalam Konvensi Jenewa IV dan secara khusus menempatkan posisi perempuan sebagai objek yang harus terutama dilindungi. Seperti yang tertulis dalam pasal 27 Konvensi Jenewa IV bahwa wanita secara khusus diberikan perlindungan secara khusus dari serangan yang mengganggu kehormatan mereka seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan dari tindakan yang tidak senonoh lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya ketika konflik terjadi, perempuan merupakan pihak yang paling banyak menjadi korban konflik.

2. *Safe Houses (Rumah Aman)*

Dengan meningkatnya jumlah keluarga yang dikepalai oleh perempuan, banyak perempuan dan anak perempuan yang harus mengambil peran penting yang

biasanya dilakukan oleh laki-laki. Hal ini semakin sulit dikarenakan adanya pengucilan sosial, kurangnya mobilitas dan sedikit akses terhadap sumber daya dan pada akhirnya menyebabkan meningkatnya resiko eksploitasi dan pelecehan seksual. Perempuan akan sulit bertahan hidup karena mendapatkan hambatan untuk menerima sarana dan kebutuhan sehari-hari.

Selain bekerjasama dengan *Yemeni Red Crescent Society (YRCS)*, ICRC juga menjalin kerjasama dengan *United Nations Population Fund (UNFPA)* untuk memberikan bantuan berupa tempat berlindung (rumah aman) bagi masyarakat sipil khususnya adalah perempuan. Di Yaman terdapat beberapa rumah aman yang tersebar hampir di seluruh wilayah. Diantaranya di kota Ibb, Sana'a, Shabwah dan lainnya. Rumah aman tersebut memberikan layanan hukum, bantuan kesehatan dan konsultasi psikososial bagi perempuan yang mengalami pelecehan dan pemerkosaan maupun bagi perempuan yang sedang hamil dan menyusui.

Rumah aman juga menerima bantuan sosial dan informasi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hak, kesehatan dan layanan perempuan. Serta memberikan keterampilan secara relevan kepada perempuan seperti pengobatan dasar, menjahit, cara mengatur keuangan rumah tangga ataupun keterampilan lainnya. Apabila memungkinkan mereka akan diberikan pekerjaan seperti menjadi staf kebersihan maupun dapur di rumah sakit sehingga perempuan mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga mereka. Tercatat dalam tahun 2016 sebanyak 6.000 perempuan mendapatkan bantuan dan perlindungan melalui rumah aman.

Pada tahun 2011 perempuan di Yaman berada pada posisi puncak untuk menuntut hak mereka ketika Presiden Saleh berhasil mundur dari masa kejayaannya dan mendapatkan sekitar 28% suara dalam *Dialogue National* menyetujui rancangan undang-undang terkait peran perempuan dalam bidang politik. Apabila rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka perempuan Yaman mendapatkan hak yang lebih terkait status dan peran mereka di Yaman. Namun sangat disayangkan, sebelum rancangan undang-undang tersebut di setujui konflik yang terjadi antara pemerintah dan kelompok Houthi semakin meluas.

Ketika dihadapkan dengan permasalahan perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan, ICRC tidak dapat bertindak banyak. Karena ICRC merupakan sebuah organisasi kemanusiaan dan bukan sebuah lembaga hukum, maka dari itu ICRC melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain yaitu UNFPA. Oleh sebab itu, permasalahan yang dihadapi wanita saat konflik terjadi bukan karena tidak ada hukum yang melindungi mereka tetapi karena hukum tidak cukup dihormati, dilaksanakan atau ditegakkan.

Kesimpulan

Upaya yang dilakukan oleh *International Committee of The Red Cross (ICRC)* dalam menegakkan pasal 27 Konvensi Jenewa IV bagi perlindungan perempuan di konflik Yaman adalah dengan memberikan bantuan medis yang mana ICRC bekerjasama dengan YRCS untuk menyalurkan obat-obat, alat kesehatan maupun tenaga medis. ICRC juga memberikan layanan rumah aman (*Safe Houses*) bekerjasama dengan

YRCS dan UNFPA. Layanan rumah aman ini memberikan bimbingan konseling bersifat psikologis terhadap perempuan yang menjadi kekerasan seksual dan pemerkosaan. Akibat dari tindak kekerasan seksual tersebut, mereka sulit untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Jika dibutuhkan rumah aman juga menyediakan fasilitas lembaga hukum yang sekiranya dapat membantu para korban. Setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh ICRC, pencapaian tujuan untuk melindungi perempuan di konflik Yaman masih belum berhasil. Dalam upaya yang dilakukan terdapat salah satu upaya yang tidak dapat ICRC laksanakan dan terapkan secara signifikan kepada korban perempuan di Yaman. Dalam pelaksanaannya ICRC tidak dapat memberikan bantuan hukum yang melindungi korban perempuan di Yaman secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan kondisi negara tersebut yang memiliki pola pikir menjunjung tinggi derajat laki-laki serta keberadaan ICRC sebagai organisasi internasional yang bersifat kemanusiaan.

Daftar Pustaka

Buku

Ambarwati, dkk., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 29.

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Dean G Pruitt, Jeffrey Z Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2004.

J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2* Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Masyhur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional Dan Pokok-Pokok Doktrin* Hankamrata, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.

Media Online

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) diakses melalui <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/> pada tanggal 9 Agustus 2017

Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949 diakses melalui [pada https://HHI-databases.icrc.org/applic/HHI/HHI.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachm ent/applic/HHI/HHI.nsf/AE2D398352C5B028C12563CD002D6B5C/FULLTEXT/ATTXSYRB.pdf](https://HHI-databases.icrc.org/applic/HHI/HHI.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachm ent/applic/HHI/HHI.nsf/AE2D398352C5B028C12563CD002D6B5C/FULLTEXT/ATTXSYRB.pdf) pada tanggal 1 Februari 2017

The Geneva Conventions of 12 August 1949 diakses melalui <https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf> pada tanggal 11 Februari 2017

The Geneva Conventions of 1949: origins and current significance diakses melalui <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/geneva-conventions-statement-120809.htm> pada tanggal 8 Maret 2018

The ICRC and the Preventing Sexual Violence Initiative diakses melalui <https://www.icrc.org/en/document/icrc-and-preventing-sexual-violence-initiative-psvi> pada tanggal 19 Oktober 2017

The ICRC's mandate and mission diakses melalui <https://www.icrc.org/en/mandate-and-mission> pada tanggal 16 Oktober 2017

The Role Of Women In Yemen's War diakses melalui <https://www.yemenpeaceproject.org/blog-x/2017/6/22/the-role-of-women-in-yemens-war> pada tanggal 4 Oktober 2017

The World Factbook diakses melalui <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ym.html> pada tanggal 17 Oktober 2017

Timeline: The rise of Yeme's Houthi rebels diakses melalui <http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2015/03/timeline-yemen-houthis-150326163406556.html> pada tanggal 2 Oktober 2017

What is International Humanitarian Law diakses melalui https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf pada tanggal 8 Maret 2018

Woman and War diakses melalui https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/women_war_special_report_8-3-03.pdf pada tanggal diakses 10 Mei 2016

Women & Conflict diakses melalui https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/toolkit_women_and_conflict_an_introduutory_guide_for_programming.pdf pada tanggal 16 Maret 2017

Women in conflict and post-conflict situations diakses melalui www.un.org/en/ecosoc/julyhls/pdf10/frances_stewart.pdf pada tanggal 28 Februari 2017